

Politik Pembangunan Agraria: Studi Analisis Perencanaan Program Agro Ekonomi Enrekang dalam RPJMD Sulawesi Selatan

Muh Burse Diharjo Azis, Anggriani Alamsyah, Febrianto Syam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: muhbursediharjo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perencanaan program agro ekonomi Kabupaten Enrekang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu konsep agro ekonomi. Secara umum pengembangan konsep agro ekonomi dalam mendukung usaha di sektor pertanian masih tergolong rendah karena keterbatasan sumberdaya, pengembangan diversifikasi produk yang belum optimal, serta pemantapan dalam mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian dengan sasaran perolehan nilai tambah serta pertumbuhan bagi kepentingan kawasan agro ekonomi khususnya di wilayah pedesaan di Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci :

Peran Pemerintah, Agro Ekonomi, Agraria

PENDAHULUAN

Pembangunan politik sebagai suatu bagian dari pembangunan secara menyeluruh karena mempunyai beberapa karakteristik. Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara dalam berbagai bentuk, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (*konvensional*) sampai bentuk yang tidak resmi (*inkonvensional*).

Sebagai negara yang sedang giat dalam melancarkan pembangunan, maka dari itu bisa lihat dari masa sekarang ini peme-

rintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengejar ketinggalan dari negara-negara maju. Salah satu dari aspek yang termasuk didalamnya adalah pembangunan politik (Mufti & Syamsir, 2016).

Pembangunan politik bertujuan agar masyarakat mempunyai kekuasaan untuk menggunakan hak politiknya untuk bisa menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga. Untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* menyangkut bermacam-macam

am kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem. Serta cara-cara melaksanakan dan tujuan tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, yang perlu dimiliki kekuasaan serta wewenang (Budiardjo, 2008).

Indonesia adalah negara yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris. Kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih hidup atau tergantung dari sektor pertanian. Masalah yang ada di sektor pertanian agro terutama dalam hubungan antara petani dan pemerintah dalam proses pembangunan. Pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi masyarakat terkhususnya para petani (Arisaputra, 2015).

Pastisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat secara utuh dalam semua proses pembangunan yang diawali dari proses perencanaan pembangunan. Pastisipasi masyarakat mengenai kondisi dan kebutuhannya. Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dan tumbuhnya rasa memiliki yang tinggi untuk ikut mengawal jalannya suatu pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih efektif dan efisien (Ashari, Wahyunadi, & Hailuddin, 2015).

Secara konseptual pengembangan agro ekonomi merupakan sebuah pendekatan pengembangan suatu kawasan pertanian desa yang mampu memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan produksi pertanian di sekitarnya, baik program atau kebijakan yang berhubungan dengan sarana produksi, jasa distribusi maupun pelayanan sosial ekonomi lainnya sehingga masyarakat setempat tidak harus menuju kota untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Pengembangan kawasan pada dasarnya mempunyai tujuan agar suatu wilayah berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah adalah pengembangan sektor pertanian (Soekartawi, 2005).

Pembangunan wilayah merupakan sebuah langkah untuk mengembangkan suatu kawasan secara holistik. Tak hanya dengan memacu pertumbuhan sosial ekonomi, namun juga mengurangi kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Melalui pengembangan kawasan dan wilayah maka pola pembangunan tidak hanya akan bertumpu pada satu titik berat sektor namun memberikan perhatian secara lintas dan multi sektor (Ainina, 2018).

Terkait dengan amanat tersebut pemerintahan Kabupaten Enrekang telah menyusun RPJPD tahun 2018-2023, yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 2008. Selanjutnya RPJPD tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran

dari visi, misi, program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Ketentuan ini termuat dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Pemerintah Daerah Enrekang, 2014).

Oleh karena itu di sini peran pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya lebih memperhatikan aspek di dalam RPJMD karena ada sebuah konsep kerja yang dimaksud agro ekonomi di Kabupaten Enrekang. Akan tetapi konsep agro ekonomi ini hanya akan dijalankan oleh Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk renstra (rencana strategi), renja (rencana kerja) tetapi sampai sekarang masih belum ada konfirmasi atau kejelasan dari pusat ke Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang terhadap diterapkan konsep strategi pengembangan kawasan agro ekonomi supaya meningkatkan perekonomian yang ada di desa bisa lebih stabil.

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini dipaparkan studi-studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik

penelitian ini, di mana penelitian-penelitian tersebut dapat membantu dalam memetakan hal-hal apa yang sudah dan belum dibidik oleh peneliti sebelumnya.

Maya Ulfayani Makmur menulis tentang *Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Bulusu Kabupaten Barru*. Penelitian ini mengkaji tentang struktur ruang dan strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan agropolitan sebagai pendekatan wilayah di Kecamatan Balusu, Barru. Guna menganalisis struktur ruang dan penerapan strategi dalam pembangunan sektor pertanian dan agrobisnis di Kecamatan Balusu sehingga diharapkan dapat ditemukan kawasan prioritas yang nantinya terpilih sebagai kawasan pengembangan dan kawasan pusat pertumbuhan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui struktur dan strategi pengembangan kawasan (Makmur, 2013).

Ainina menulis tentang *Studi Pengembangan Sektor Pertanian sebagai Strategi Pembangunan Wilayah Pedesaan di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Penelitian ini mengkaji tentang masalah infrastruktur dan pengadaan sarana belum mendukung kegiatan pertanian yang ada, belum ada pengolahan/pemasaran yang baik terhadap potensi desa, panen biasanya dilakukan secara tradisional tidak ada upaya bagaimana agar hasil panen dapat diolah dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan hasil dari pertanian tidak bisa meningkat. Guna mengoptimalkan peran sektor pertanian dalam pembangunan perdesaan serta menggerakkan pertumbuhan wilayahnya melalui kegiatan

pertanian. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui potensi pertanian dan strategi pembangunan berbasis agro di kawasan pertanian (Ainina, 2018).

Didin S. Damanhuri menulis tentang *Akar Problematik Ekonomi Politik Pertanian dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Penelitian ini mengkaji tentang akar persoalan dalam pembangunan di sektor pertanian. Setelah swasembada beras tercapai sekitar satu dasawarsa, tingkat kesejahteraan relatif petani lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya yang tidak bertambah baik. Antara lain dengan melihat Nilai Tukar Petani (NTP) yang umumnya menurun atau setidaknya stagnan. NTP tersebut pengertiannya adalah sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang atau jasa, baik untuk konsumsi maupun untuk keperluan memproduksi produk pertanian. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Bappeda-Bappeda dengan perguruan tinggi serta dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengidentifikasi strategi industrialisasi yang tepat guna untuk tingkat pedesaan tersebut, misalnya dalam bentuk kemitraan (Damanhuri, 2000).

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Agro Ekonomi

Ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi hasil-hasil pertanian. Pertanian merupakan industri primer yang

mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air, dan mineral, serta modal dalam berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia (Ratag, Kapantow, & Pakasi, 2016).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekonomi dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan sumber daya hayati sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan atau sumber energi dan untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai "Sektor Unggulan" dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2011). Padahal proses pembangunan ekonomi merupakan salah

satu kemampuan merumuskan batasan terus menerus atas peranan sektor pertanian. Melihat kondisi ekonomi dengan sektor pertanian yang cukup besar, maka strategi pembangunan ekonomi yang tepat yaitu dengan mendahulukan sektor pertanian tersebut. Ada tiga tahap dalam pembangunan pertanian di antaranya (Arsyad, 2010):

Tahap Pertanian Tradisional

Dalam pertanian tradisional, produk dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja (biasanya jagung atau padi) yang menjadi sumber bahan makanan utama. Pada tahap ini, tingkat produksi dan produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana (teknologi yang dipakai rendah). Selain itu, penanaman atau penggunaan modal juga hanya sedikit sekali, sedangkan tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor produksi yang dominan.

Pertanian tradisional bersifat tidak menentu. Keadaan ini bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa manusia seolah-olah hidup di atas tonggak. Pada daerah-daerah yang lahan pertaniannya sangat sempit dan penanaman hanya tergantung pada curah hujan yang tak dipastikan, produk rata-rata akan menjadi sangat rendah dan dalam keadaan tahun-tahun buruk, para petani dan keluarganya akan menghadapi bahaya kelaparan yang sangat mencekam (Arsyad, 2010).

Tahap Pertanian Menuju Modern

Pada tahap ini penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi penggunaan modal dan teknologi masih rendah. Upaya untuk mengenalkan tanaman perdagangan dalam pertanian tradisional seringkali gagal dalam membantu petani untuk meningkatkan tingkat kehidupannya. Menggantungkan diri pada tanaman perdagangan bagi para petani kecil lebih mengundang resiko daripada pertanian subsisten murni karena risiko fluktuasi harga menambah keadaan menjadi lebih tidak menentu. Keberhasilan atau kegagalan dari setiap upaya untuk mentransformasikan pertanian tradisional tidak hanya tergantung pada keterampilan (Arsyad, 2010).

Tahap Pertanian Modern

Tahap ini menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh penggunaan modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada tahap ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan komersial. Pertanian modern (*spesialisasi*) bisa berbedabeda dalam ukuran dan fungsinya. Mulai dari jenis pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam secara intensif, sampai pada pertanian gandum dan jagung yang sangat besar seperti di Amerika Utara. Hampir semua menggunakan peralatan mekanis yang sangat hemat tenaga kerja, mulai dari jenis traktor yang paling besar dan mesin panen yang modern (Arsyad, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Agustinova, 2015). Fokus penelitian ini mengkaji tentang politik pembangunan agraria dengan menganalisis perencanaan program agro ekonomi Kabupaten Enrekang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam menganalisis persoalan di atas, selain menggunakan sejumlah teori, penulis pun menggunakan pendekatan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi dengan melihat kondisi sosial-politik yang terjadi dalam proses pembangunan agro ekonomi Kabupaten Enrekang (Salim & Syahrudin, 2012). Dengan melakukan observasi, wawancara atau interview kepada pihak-pihak yang memiliki kapabilitas atau basis keilmuan yang sesuai dengan topik penelitian penulis, kemudian dokumentasi yang dilakukan dengan memotret kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan riset yang dilakukan serta berfoto dengan para informan sebagai bukti empirik (Sugiyono, 2014).

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan menerapkan langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data yang didapatkan di lapangan dipilih hal-hal yang dianggap penting menjadikannya dalam pembahasan yang singkat untuk kemudian melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Program Pengembangan Kawasan Agro Ekonomi

Pengembangan pembangunan sektor pertanian di pedesaan menghadapi berbagai tantangan dengan semakin terbatasnya peran pemerintah terhadap petani. Berbagai potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor pertanian ini diharapkan mampu untuk dikelola dan diatasi dengan baik. Peran serta petani, pemerintah, perguruan tinggi dengan tridharmanya, serta masyarakat umum sangat diperlukan dalam mendukung peningkatan potensi dan pengembangan sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian merupakan suatu bentuk usaha-usaha ataupun suatu proses menuju ke arah yang lebih baik di dalam sektor pertanian di mana untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa atau masyarakat. Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia (Pratama, 2017).

Berkaitan dengan RPJMD Dinas Bappalitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yakni Muh Musdar diwawancarai memaparkan hal berikut:

“Terkait dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memang ada konsep agro di sektor pertanian dan proses pembangunan pedesaan yang ada di Kabupaten Enrekang terkhususnya di sektor pertanian. Tapi sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda proses pembangunan desa yang ada di RPJMD tersebut mungkin ada beberapa faktor yakni seperti APBD Ka-

bupaten Enrekang pada tahun 2021 sangat memprihatinkan atau menurun sekali mungkin itu sebabnya proses pembangunan saat ini belum ada kejelasannya. Kalau untuk konsep agro kamu bisa wawancara ke Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dan terkait pembangunan gedung itu kami pun sudah menghubungi pihak Dinas Pertanian provinsi dan pihak Dinas Bappeda Kabupaten Enrekang karena sudah beberapa kali kami mengirimkan anggaran sampai sekarang belum dilaksanakan pembangunan karena didalam terdapat program Dinas Pertanian.” (Suni, 2022).

Berbicara masalah RPJMD peneliti selanjutnya mewawancarai Staf Bappeda Kabupaten Enrekang, Pardi terkait dengan proses pembangunan sektor pertanian yang ada di Kabupaten Enrekang:

“Berbicara tentang pembangunan yang ada di Enrekang memang untuk saat ini masih belum ada di sektor pertaniannya. Ini pun baru dibagian kesehatan. Nah kalau pembangunan untuk pertanian seperti pembuatan gudang untuk tempat hasil alam dan gedung pertanian mandiri itu memang sudah ada konfirmasi dari pusat terkait pembuatannya. Bahkan sudah ada anggaran tapi sampai saat ini anggarannya pun selalu dipakai ke instansi lain dengan alasan agro ekonomi belum terlaksana. Kita masih tindak lanjuti karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa APBD kami ini sangat menurun jadi itu faktor kenapa sampai saat ini belum ada proses pembangunan dan kita juga tunggu informasi dari Dinas Pertanian kabupaten terkait masalah itu. Langka kita untuk antisipasi itu yah kita harus yakinkan atau berkomunikasi dengan para petani terkait pembangunan di sektor pertaniannya.” (Pardi, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa memang faktor utama lambatnya proses pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Enrekang yakni APBD dan masih ada beberapa faktor lainnya namun untuk solusi yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang yaitu berkomunikasi dan meyakinkan kepada para petani bahwa proses pembangunan gudang dan lain-lain ada diproses dan akan diberitahu oleh Dinas Pertanian kabupaten.

Strategi Pengembangan Kawasan Agro Ekonomi

Rencana Strategis Pengembangan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Berkaitan dengan strategi pengembangan kawasan melalui Kasubag Bagian Program Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Nur Alamsyah memaparkan hal berikut :

“Terkait dengan strategi pengembangan di Enrekang kita sebagai tim Dinas Pertanian Provinsi sudah menyiapkan konsep strategi di renstra dan renja. Ketika tim kita menyurvei di Kabupaten Enrekang membahas tentang strategi, alhamdulillah direspon baik oleh Dinas Pertanian Kabupaten sehingga sudah di fixkan strateginya. Tinggal programnya mami yang belum dan harus didiskusikan karena kita tunggu konfirmasi dari pusat maupun orang Dinas Pertanian Kabupaten. Adapun strateginya yaitu ada 2 yang cocok untuk diterapkan di Kabupaten Enrekang itu, strategi SO dan strategi ST.” (Alamsyah, 2022).

Lalu peneliti selanjutnya mewawancarai Aco selaku ketua kelompok tani Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

“Kalau untuk persoalan agro pernah saya mendengar di rapat musrembang kabupaten terkait agro ekonomi dan agro lainnya, memang agro ini dipenjelasan musrembang kemarin sangat menguntungkan bagi saya sebagai petani karena sampai sekarang di sektor pertanian Kabupaten Enrekang petani tidak ada perhatian dari pemerintah dinas seperti pembagian pupuk tidak merata, pemberian alat petani untuk kelompok tani. Janji pembuatan gudang hasil petani perkecamatan masih belum ada sampai saat ini jadi saya berharap kepada pemerintah disahkan ini konsep agro.” (Aco, 2022).

Bentuk Strategi Agro Ekonomi Enrekang Strategi SO (*strength opportunities*) dan Strategi ST (*strength threats*), yaitu :

- a. Menyusun roadmap peningkatan produktivitas hasil tanaman pangan (SO).
- b. Menyusun rencana aksi pemantapan ketahanan pangan (SO).

- c. Menambah jumlah lumbung pangan masyarakat (SO).
- d. Perluasan lahan dan areal tanam untuk meningkatkan jumlah produksi (SO).
- e. Peningkatan daya saing komoditas unggulan hortikultura di kawasan agro ekonomi sehingga memiliki kuantitas, kualitas lebih baik (SO).
- f. Peningkatan kemitraan antara kelompok tani dengan dunia usaha dan dunia industri (SO).
- g. Menyusun program tentang sistem cadangan pangan dan tanggap darurat yang di tangani secara terpadu (ST).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Kedudukan dan peran penyuluh pertanian yang sangat strategis sesuai dengan mandatnya sebagai penyelenggara pendidikan luar sekolah (non-formal) bagi petani, semakin dituntut berbenah diri meningkatkan kemampuan sebagai tenaga profesional di bidangnya. Agar pembangunan pertanian dapat mencapai sasaran, penyuluh pertanian sebagai ujung tombak harus dapat menentukan kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah dengan kepentingan dan keinginan petani.

Berkaitan dengan faktor pendukung kawasan agro ekonomi di Kabupaten Enrekang melalui Kasubag Bagian Program Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Nur Alamsyah memaparkan hal berikut :

“Kalau untuk persoalan faktor pendukung kawasan agro itu kita dan tim sudah mikirkan jauh-jauh hari sebelum adanya

bentuk program dan strategi agro ekonomi ini. Karena kalau kita membuat sesuatu konsep kita harus memikirkan hal yang baik dan buruknya, alhamdulillah tim kita sudah mensurvei dan mendiskusikan pembentukan konsep agro di Kabupaten Enrekang. Oleh sebab itu ketika sudah diterapkan konsep agro ini akan semakin banyak faktor pendukungnya seperti perekonomian sudah semakin stabil, mudah mudahan pun proses penyusun sudah lebih maksimal.” (Alamsyah, 2022).

Faktor pendukung Kawasan Agro Ekonomi Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- a. Potensi sumberdaya mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Penerapan teknologi pasca panen serta promosi produk tanaman pangan dan hortikultura.
- c. Peningkatan prasarana pertanian berupa irigasi.
- d. Sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- e. Penggunaan pupuk dan pestisida memenuhi, yaitu: tepat waktu, jenis, jumlah, tempat dan harga.
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian.
- g. Peluang kerjasama dengan perbankan untuk permodalan bidang pertanian.
- h. Penerapan teknologi untuk memudahkan pengembangan pertanian.

Ada faktor pendukung keberhasilan suatu program pertanian adalah Proses penyuluh pertanian memegang peran penting terhadap keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Proses penyuluhan dengan para

penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah antara pengetahuan yang dibutuhkan petani dengan pengalaman baru yang terjadi di pihak para ahli dan kondisi nyata yang dialami petani.

Faktor Penghambat

Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh peran serta petani dan penyuluh dalam melaksanakan kegiatan usaha tani, peran serta petani dan penyuluh pertanian dapat ditingkatkan melalui kegiatan penyuluh pertanian, sehingga kegiatan usaha dapat diarahkan, selain untuk meningkatkan kemampuan petani itu sendiri. Terdapat faktor yang menghambat keberhasilan penyuluh pertanian. Masalah dalam mengembangkan pesan, sebab dalam proses komunikasi tidak hanya sekedar berbicara saja, tapi pesan itu dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila perubahan perilaku sebagai bagian dari tujuan penyuluhan belum tercapai, jangan hanya sasaran yang dipersalahkan. Jangan-jangan masalahnya justru dari komunikator yaitu penyuluh sebagai pembawa pesan.

Berkaitan dengan faktor penghambat kawasan agro ekonomi di Kabupaten Enrekang melalui Kasubag Bagian Program Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Nur Alamsyah memaparkan hal berikut :

“Kalau untuk persoalan faktor penghambat kawasan agro itu kalau menurut saya diproses penyuluhan atau penjelasan kepada para warga Enrekang atau para petani. Mengenai teknologi berbasis pertanian karena pasti itu tantangan yang sangat besar bagi kami.” (Alamsyah, 2022).

Faktor penghambat Kawasan Agro Ekonomi Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- a. Penyuluhan atau penjelasan berbasis teknologi pertanian ke semua petani Kabupaten Enrekang.
- b. Pemanfaatan lahan pertanian sehingga penghijauan sudah kurang dan menyebabkan banyak hal yang tidak diinginkan.
- c. Tingginya aplikasi pestisida kimia pada lahan pertanian.
- d. Kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur pengairan dan akan merusak lingkungan.

Masalah dalam menafsirkan pesan, melalui proses komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan atau dapat dimengerti oleh penerima pesan tersebut. Menghindari ini semua, dalam penyuluh pertanian perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu, sehingga proses penyuluh pertanian untuk membantu petani mencapai tujuannya dapat terlaksana dengan baik, dengan menghilangkan faktor penghambat yang kemungkinan besar dapat terjadi dalam komunikasi. Tampak peran komunikasi amat besar dalam kegiatan penyuluh, yang akan mempengaruhi dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya.

KESIMPULAN

Dalam perspektif pengembangan agro ekonomi dalam meningkatkan perekonomian petani menunjukkan bahwa harus ada-

nya hubungan yang saling menguntungkan dan saling mendukung sehingga terdapat penyamaan kemitraan dalam berusaha antara penduduk desa dengan Dinas Pertanian. Sedangkan untuk pengembangan konsep agro ekonomi dalam mendukung usaha di sektor pertanian masih tergolong rendah karena keterbatasan sumber daya, pengembangan diversifikasi produk yang belum optimal, serta pemantapan dalam mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian dengan sasaran perolehan nilai tambah serta pertumbuhan bagi kepentingan kawasan agro ekonomi khususnya di wilayah pedesaan di Kabupaten Enrekang.

Adapun 4 peran Dinas Pertanian yang sudah dikatakan sesuai dengan harapan masyarakat di antaranya, yaitu: *Pertama*, peran fasilitator. Pemerintah berperan membantu petani mendapatkan hasil produksi yang baik dan pemerintah sudah memberikan bantuan berupa bibit, pupuk maupun obat-obatan untuk membasmi hama penyakit tanaman. *Kedua*, peran innovator. Di mana pemerintah dalam mendorong kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, contohnya mereka memilihkan bibit yang unggul, pupuk bersubsidi, juga obat-obatan sehingga hasil produksi yang diperoleh akan meningkat pesat tanpa adanya hambatan. *Ketiga*, peran modernisator. Dimana peran pemerintah dalam mendorong petani untuk mau menggunakan teknologi baru.

Faktor pendukung dalam memberikan penyuluhan pertanian adalah adanya bantuan dari Pemerintah berupa alat pertanian serta

sarana dan prasarana yang menunjang proses penyuluhan pertanian. Sikap petani yang mudah diajak berdiskusi ketika ada masalah dalam bertani yang sedang dihadapi. Serta adanya kerjasama dari petani untuk sama-sama meningkatkan produksi komoditas pertanian dan memajukan sektor pertanian. Faktor penghambat dalam memberikan penyuluhan pertanian di Enrekang adalah hambatan yang berasal dari luar kemampuan anggota kelompok tani, yaitu mereka sulit mengadopsi pesan yang disampaikan oleh komunikator dan teknologi baru yang bersifat modern karena selama ini mereka masih bertani secara tradisional. Hambatan yang berasal dari faktor bibit, pupuk, obat-obatan. Lalu hambatan lain yang berasal dari faktor sosial-ekonomi seperti harga, resiko, ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ainina. (2018). *Studi Pengembangan Sektor Pertanian Sebagai Strategi Pembangunan Wilayah Perdesaan di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Skripsi*. Gowa: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Arisaputra, M. I. (2015). *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Edisi V*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara: Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 2*, 163-180.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damanhuri, D. S. (2000). Akar Problematik Ekonomi Politik Pertanian dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 515-527.
- Makmur, M. U. (2013). *Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Bulusu Kabupaten Barru, Skripsi*. Gowa: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Mufti, M., & Syamsir, A. (2016). *Pembangunan Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pemerintah Daerah Enrekang. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018*. Enrekang: Pemerintah Daerah Enrekang.
- Pratama, M. R. (2017). *Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja dan Distribusi*

Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara, Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.

Ratag, J. P., Kapantow, G. H., & Pakasi, C. B. (2016). Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian di Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-SosioEkonomiUnsrat*, Vol. 12 No. 2A, 239-250.

Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Citapustaka Media.

Soekartawi. (2005). *Prinsip Ekonomi Pertanian.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 2.* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Wawancara

Aco. (2022, Januari 13). Ketua Kelompok Tani Kabupaten Enrekang.

Alamsyah, N. (2022, Januari 6). Kasubag Bagian Program Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.

Pardi. (2022, Januari 12). Staf Dinas Bappeda Kabupaten Enrekang.

Suni, M. (2022, Januari 5). Staf Dinas Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.